

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah jawa timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(2).
- Ajija, Schochrul Rohmatul, dkk. 2020. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprianto, I. (2021). The Effect Of Leverage, Legislative Measures, Intergovernmental Revenue And Regional Tax Revenue On Regency/City Government Financial In Indonesia. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 9(3), 91-99.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Tahun 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (14 September 2018). Berita Utama. Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/pentingnya-tindak-lanjut-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-bpk>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews* (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Dewata, E., Ilmiyyah, N. M., & Sarikadarwati, S. (2017). faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi

sumatera selatan tahun 2012-2015. *Jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis*, 5(1), 147-162.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Dokumen Publikasi. Anggota DPRD Seluruh Indonesia Masa Jabatan 2019-2024. Diakses dari <https://otda.kemendagri.go.id/publikasi>

Fauzi, F., Basyith Dencik, A., & Isnaini Asiati, D. (2021). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data*. Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.

Jensen M.C. and Meckling, W. H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial economics*. Vol.3, 305-360.

Kaplan, Robert S. dan Norton, David P. 1096. *Balanced Scorecard, Menerjemahkan Strategi Menjadi Aksi*, Alih Bahasa : Peter R. Yosi Pasla, 2000, Jakarta : Erlangga.

Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44-54.

Lupiyoadi, Rambat dan Ridho Bramulya Ikhsan. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 51-55.

Mulyati. 2015. *Terampil Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.

Nurhayati, N., Suhendar, D., Nurhandika, A., Rostika, T., & Purnama, D. (2022, August). Affecting Financial Performance: Factors In Local Government, Indonesia. In *Proceedings of the 2nd Universitas Kuningan International Conference on System, Engineering, and Technology, UNISSET 2021, 2 December 2021, Kuningan, West Java, Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
- Priyatno. 2018. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPS*. Yogyakarta: Media Kom.
- Setiyanningrum, I., & Isroah, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3).
- Setyoko, Arnanda, M. Agus Sudrajat, and Moh Ubaidillah. "Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Pada Pemerintah Kota Madiun Tahun 2016-2019)." *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. 3. 2021.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., Rohman, A., & Widad, A. (2019). Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 12(2), 186-207.
- Udirizqi, A., Setyobudi Irianto, B. S., & Sukirman, D. (2016). The Influence of Audit Opinion, Follow Up Audit Recommendations, and Corruption Perceptions Index Toward Financial Performance of Local Government (Empirical Study of the District/City in Indonesia). *Dr., The Influence of Audit Opinion, Follow Up Audit Recommendations, and Corruption Perceptions Index Toward Financial Performance of Local Government (Empirical Study of the District/City in Indonesia)(March 2, 2016)*.
- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
- Yamin, R., Mas' ud, M., & Sjarlis, S. (2022). Management of Assets and Follow-Up the Findings of the Audit Board to Increase Financial Performance of Local Governments. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(1), 37-43.
- Zami, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(2), 121-130.